

Syahrudin, Werry Darta Taifur and Ediharsi

Perkembangan Desentralisasi Sistem Penganggaran
(Development of a System of Budgeting)

Project 497-0357 / 104-000

Strategic Objective 1

ECG, USAID/Indonesia

Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March 2000

UNAND, Workshop, 120 / LPEM FEBU

26

Perkembangan Desentralisasi Sistem Penganggaran

Oleh: Syahrudin
Werry Darta Taifur
Ediharsi

Pusat Studi Kependudukan
Universitas Andalas, Padang
Maret 2000

PERKEMBANGAN DESENTRALISASI SISTEM PENGANGGARAN

Oleh: Syahrudin^{*)}

Werry Dartta Taifur^{*)}

Ediharsi^{**)}

1. Pendahuluan

Pemerintah secara sungguh-sungguh telah menyiapkan sejumlah perangkat otonomi daerah untuk dapat meningkatkan keberdayaan pemerintahan di daerah semenjak beberapa tahun yang lalu. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penyerahan beberapa kewenangan dari Pusat ke Daerah. Kemudian diikuti oleh perubahan pemberian bantuan proyek menjadi bantuan yang bersifat blok. Dalam tahun 1997 diterbitkan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah yang bertujuan untuk penyempurnaan sistem keuangan daerah dalam kaitannya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terakhir adalah pemberian kekuasaan yang lebih luas pada daerah baik dari segi kewenangan dalam pemerintahan maupun dari sisi pengelolaan keuangan (penganggaran keuangan) yang diatur oleh UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini mencakup otonomi luas pada daerah Kabupaten dan Kota yang sebelumnya disebut sebagai Daerah Tingkat II.

Tulisan ini mencoba melihat sampai berapa jauh persiapan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang keuangan telah dilaksanakan oleh daerah baik untuk daerah Propinsi maupun untuk daerah Kabupaten/Kota berdasarkan berbagai penelitian penelitian yang ada. Jika diajukan pertanyaan kepada pejabat di daerah tentang kesiapan untuk pelaksanaan otonomi daerah, jawabnya adalah "siap". Pada kantor Pemerintahan Propinsi sudah ada biro baru yang ditugaskan untuk urusan otonomi yaitu: Biro Otonomi Daerah dibawah Asisten Sekwilda Bidang Pemerintahan (Ass. IV). Di Sumatera Barat telah ada beberapa kali pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Propinsi untuk melakukan persiapan menghadapi otonomi luas. Setiap Kabupaten dan Kota telah selesai membuat susunan kelembagaan dan jumlah personil yang diperlukan

^{*)} Kepala/Sekretaris Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas, Padang

^{**)} Kepala PSKD Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang

sesuai kebutuhan daerah. Langkah berikut adalah menunggu ketentuan (petunjuk) pusat untuk langkah berikutnya. Jadi berarti daerah memang telah siap sesuai visi daerah, tetapi belum siap ditinjau dari segi keuangan daerah.

2. Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Daerah

Rencana Anggaran Daerah (RAPBD) disusun oleh Kepala Daerah dan disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebelum dilaksanakan, anggaran yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan perlu mendapat pengesahan dari atasan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui (Ps. 86, butir 5). Selanjutnya ditetapkan bahwa: pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban, dan pengawasan serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (Ps. 86, butir 6).

Pasal 86 UU No. 22 tahun 1999 memberikan sedikit kekaburan tentang desentralisasi dalam bidang keuangan daerah. Kekaburan terlihat pada pengertian kata "untuk diketahui". Apakah perkataan ini mengandung makna (arti) perlu tanda tangan Presiden untuk APBD Propinsi atau tidak. Kekaburan ini semakin diperjelas oleh perkataan "sesuai peraturan perundang-undangan". Jika pengertian kata "untuk diketahui" mengandung makna perlu paraf atau tanda tangan, maka berarti belum terjadi perubahan yang berarti dengan kondisi sebelumnya. Tetapi jika tidak, berarti kewenangan daerah untuk menggunakan semua penerimaan akan semakin besar.

Daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota) telah berpengalaman banyak dalam penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang menjadi persoalan adalah: apakah kegiatan penyusunan anggaran itu, baik pengeluaran maupun penerimaan, sudah dapat dilakukan dengan baik atau belum. Baik tentu dalam arti sesuai dengan kriteria penilaian anggaran yang tersedia. Analisis pertama dimulai dari pengeluaran dan dilanjutkan dengan analisis penerimaan.

sesuai kebutuhan daerah. Langkah berikut adalah menunggu ketentuan (petunjuk) pusat untuk langkah berikutnya. Jadi berarti daerah memang telah siap sesuai visi daerah, tetapi belum siap ditinjau dari segi keuangan daerah.

2. Kebijakan Penusunan Anggaran Daerah

Rencana Anggaran Daerah (RAPBD) disusun oleh Kepala Daerah dan disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebelum dilaksanakan, anggaran yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan perlu mendapat pengesahan dari atasan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui (Ps. 86, butir 5). Selanjutnya ditetapkan bahwa: pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (Ps. 86, butir 6).

Pasal 86 UU No. 22 tahun 1999 memberikan sedikit kekaburan tentang desentralisasi dalam bidang keuangan daerah. Kekaburan terlihat pada pengertian kata "untuk diketahui". Apakah perkataan ini mengandung makna (arti) perlu tanda tangan Presiden untuk APBD Propinsi atau tidak. Kekaburan ini semakin diperjelas oleh perkataan "sesuai peraturan perundang-undangan". Jika pengertian kata "untuk diketahui" mengandung makna perlu paraf atau tanda tangan, maka berarti belum terjadi perubahan yang berarti dengan kondisi sebelumnya. Tetapi jika tidak, berarti kewenangan daerah untuk menggunakan semua penerimaan akan semakin besar.

Daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota) telah berpengalaman banyak dalam penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang menjadi persoalan adalah: apakah kegiatan penyusunan anggaran itu, baik pengeluaran maupun penerimaan, sudah dapat dilakukan dengan baik atau belum. Baik tentu dalam arti sesuai dengan kriteria penilaian anggaran yang tersedia. Analisis pertama dimulai dari pengeluaran dan dilanjutkan dengan analisis penerimaan.

a. Analisis pengeluaran daerah

Secara keseluruhan pengeluaran daerah terbagi yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Untuk belanja rutin ada ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dipedomani. Oleh karena itu persoalannya tidak terlalu besar dalam pengambilan keputusan. Persoalan akan menjadi besar jika daerah tidak mampu menentukan kebutuhan personalia secara riil sesuai kebutuhan daerah.

Untuk menentukan jumlah personil yang diperlukan, Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai pertemuan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota. Langkah pertama adalah melakukan analisis tentang Personil, Peralatan dan Pembiayaan (3P). Analisis dilanjutkan dengan penyusunan rencana kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap daerah telah siap dengan rencana kelembagaan tersebut dan perhitungan jumlah kebutuhan personil satu daerah ada yang mengusulkan 20 dinas, ada yang mengusulkan 12 dinas dan sebagainya (Tabel 1). Begitu juga halnya dengan kebutuhan terhadap lembaga teknis. Jumlahnya adalah beragam antar kabupaten/kota.

Kabupaten Pasaman memperkirakan sebanyak 15 dinas yang diperlukan dan 3 lembaga teknis. Jumlah kebutuhan personil adalah 2.300 orang yang terdiri dari:

Eselon I	1 orang
Eselon II	21 orang
Eselon III	118 orang
Eselon IV	382 orang
Eselon V	288 orang
Staf Kabupaten	1.322 orang
Staf Kecamatan	<u>168 orang</u>
Jumlah	2.300 orang

Jumlah personil yang ada (non-guru) adalah 2.064 orang. Jadi ada kekurangan sebanyak 236 orang. Berdasarkan jumlah ini, Pemerintah Daerah dapat menyusun kebutuhan terhadap belanja pegawai dan seterusnya belanja rutin.

Selanjutnya, PAD dan Bagi Hasil yang diperkirakan akan diperoleh oleh Pasaman tahun 1999/2000 berjumlah sekitar Rp. 3.014,7 juta. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Pegawai yang berjumlah sekitar Rp 27.299, 1 juta pada tahun anggaran yang sama. Tidak salah apa yang diungkapkan oleh Drs. Azhar Noor,

Kepala Biro Otonomi Daerah, bahwa daerah sekarang menunggu keputusan dari pusat untuk pengesahan struktur organisasi dan kelembagaan yang telah disusun oleh setiap daerah, sebab sebahagian besar kebutuhan pembiayaan diharapkan berasal dari pusat melalui dana perimbangan.

Analisis pengeluaran pembangunan memberikan indikasi bahwa kurang kemampuan daerah untuk menjabarkan lebih jauh tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1999 tertanggal 11 Pebruari 1999. Ada lima prinsip penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yaitu: (1) Keadilan Anggaran, (2) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, (3) Anggaran Berimbang dan Dinamis, (4) Disiplin Anggaran dan (5) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Prinsip pertama dan kedua adalah merupakan dua dari tiga fungsi negara dalam bidang ekonomi. Untuk pengeluaran pembangunan, prinsip pertama mengandung arti pemerataan dan prinsip kedua berarti efisiensi. Efisiensi dalam arti perbandingan antara *benefit* dengan *cost*. Pada barang privat lazim disebut dengan istilah B/C ratio. Konsep ini bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan untuk penyediaan *public utilities* pada lokasi tertentu.

Kedua prinsip ini belum dapat dilaksanakan oleh daerah dengan baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian penulis di Kota Pekanbaru dengan menggunakan kasus penyusunan anggaran oleh Dinas PU Kota Pekanbaru (lihat: Syahrudin & Husna, 1999). Dari 25 (duapuluh lima) usulan proyek untuk tahun 1997/98 dengan biaya Rp 5.685 juta, yang disetujui adalah 5 (lima). Proyek dengan jumlah dana Rp 1.224,3 juta (sekitar 22%). Kesemua proyek yang disetujui ini bukanlah yang mempunyai urutan 1 sampai dengan 5, tetapi mempunyai urutan yang beragam. Jadi berarti penyampaian Usulan Proyek oleh Dinas PU Kota tidak mempunyai urutan prioritas. Disamping itu terdapat pula perbedaan volume pekerjaan. yang menyolok adalah perubahan volume jembatan dari P 8m dan L 9m yang diusulkan berubah menjadi P.12m dan L 4m. Bagaimanakah mungkin perubahan volume pekerjaan jembatan ini?

Tidak adanya prioritas dalam pengajuan anggaran ini tidak sesuai pula dengan prinsip keempat dari prinsip penyusunan anggaran yaitu Disiplin Anggaran. Prinsip ini

menyatakan bahwa: Anggaran Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya, disusun berdasarkan prioritas yang sesuai dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Disamping itu, prinsip keempat ini menyatakan bahwa: (1) tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka bila masih memungkinkan.

Pelaksanaan perubahan anggaran sebenarnya dicakup pula oleh prinsip ketiga yaitu: anggaran berimbang dan dinamis. Pengertian dinamis mengandung arti adanya perubahan anggaran pada tahun anggaran berjalan yang dapat dilakukan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Sedangkan perkataan seimbang berarti belanja sama besarnya dengan penerimaan daerah yang realistis, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan Keuangan, maupun Pinjaman Daerah. Prinsip ini pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh setiap daerah.

Prinsip terakhir yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran meliputi keharusan Daerah untuk mampu memberikan informasi yang lengkap untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam berbagai format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya sistem perencanaan yang sudah ada aturannya mulai dari penyiapan rencana jangka panjang, jangka menengah, (Repelita) dan rencana tahunan (Repetada) sebelum RAPBD disusun dan perhitungan anggaran setelah APBD dilaksanakan, maka berarti prinsip ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik. APBD ataupun perhitungan anggaran ditetapkan dengan Perda (Peraturan Daerah) yang berarti sudah dapat diketahui oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Penilaian ekonomis proyek nampaknya masih menjadi kendala. Apalagi jika yang dipersoalkan adalah efisiensi seperti telah diungkapkan diatas. Walaupun Rencana Jangka Panjang, Repelita dan Repetada sudah diwajibkan sebagai dasar penyusunan RAPBD, namun dalam pelaksanaannya jika diteliti secara mendalam belum ada kaitannya satu sama lain. RAPBD belum terkait pada Repetada dan Repetada belum mempunyai hubungan yang jelas dengan Repelita. Kelemahan utama adalah kualitas Repelita dan Repetada yang rendah sekali. Bappeda lebih tertarik pada pelaksanaan proyek dibandingkan dengan

keinginan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik. Dampaknya tentu pada pelaksanaan pengawasan.

b. Analisis penerimaan daerah

Fokus kita adalah untuk mengemukakan kesiapan daerah menghadapi desentralisasi penganggaran dilihat dari sisi penerimaan UU No. 22 tahun 1999 menetapkan sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan yang sah, (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah dan (4) lain-lain pendapatan yang sah. Besarnya penerimaan daerah dari sumber pertama dan ketiga sepenuhnya tergantung pada kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di daerah. Sedangkan sumber kedua dan keempat tidak sepenuhnya tergantung kepada kemampuan aparat di daerah.

Dana perimbangan (sumber kedua) yang terdiri dari (1) bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam, (2) dana alokasi umum, dan (3) dana alokasi khusus, lebih banyak dipengaruhi oleh potensi daerah dan kebaikan hati Pemerintah Pusat. Butir pertama yaitu bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan penerimaan dari sumber daya alam lebih ditentukan oleh potensi daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam seperti: Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian Jaya tentu akan mendapat dana besar dari sumber ini. Sedangkan daerah yang miskin sumber daya alam seperti Sumatera Barat, Bengkulu dan sebagainya akan mendapatkan jumlah penerimaan yang kecil saja. Daerah-daerah ini akan lebih banyak berharap dari sumber kedua yaitu "dana alokasi umum".

Belum ada kriteria yang jelas untuk menentukan jumlah penerimaan satu daerah tertentu dari dana alokasi umum ini. Secara total dialokasikan minimal 25 persen dari Penerimaan Negara dari Dalam Negeri. Sekitar 10 persennya dialokasikan untuk Daerah Propinsi dan sisanya sebesar 90 persen dialokasikan untuk Daerah Kabupaten/Kota. Distribusi antar propinsi atau antar kabupaten/kota ditentukan oleh "bobot daerah". Sedangkan bobot daerah didasarkan kepada kebutuhan wilayah otonomi daerah dan

potensi ekonomi daerah. Penerimaan daerah tertentu dari sumber dana alokasi umum ini ditentukan oleh proporsi bobot daerah terhadap bobot semua daerah dikalikan dengan dana yang tersedia. Perhitungannya akan dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan anggapan “Konsep Penataan Kelembagaan dan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah” yang telah disiapkan oleh masing-masing Kabupaten dan Kota dapat dijadikan sebagai ukuran kebutuhan wilayah otonomi daerah, maka berarti kebanyakan daerah yang ada di Indonesia diperkirakan sudah siap dengan perencanaan tersebut. Tetapi, apakah hasil penataan kelembagaan dan pola organisasi yang telah dimiliki oleh setiap daerah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah masih merupakan persoalan. Dari sampel yang ada (Tabel 1) terlihat adanya ketidak sesuaian antara kondisi daerah dengan pelayanan yang disediakan. Kabupaten Pariaman yang terletak dipinggir pantai tidak membutuhkan Dinas Perikanan. Tetapi, Kabupaten Solok yang jauh dari pantai dan sumber airpun tidak terlalu besar memerlukan Dinas Perikanan. Pariaman, Agam, Padang dan sebagainya menggabungkan Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya menjadi satu institusi yang disebut sebagai Dinas PU, sedangkan Solok yang diperkirakan tidak berbeda banyak dengan Agam atau Pariaman membutuhkan tiga Dinas yaitu PU Bina Marga, PU Pengairan dan PU Cipta Karya.

Sulit untuk dicarikan alasan terjadinya perbedaan kebutuhan kelembagaan yang cukup besar antar daerah ini. Kemungkinan adalah belum adanya studi tentang kebutuhan daerah secara riil. Belum ada studi yang menjelaskan tentang kebutuhan pelayanan yang diperlukan oleh satu daerah tertentu. Sehingga dengan demikian belum dapat disusun besarnya volume pelayanan yang diperlukan. Akibatnya baru sampai pada pengemukaan berdasarkan perasaan.

Selanjutnya apakah pengelolaan PAD sudah berjalan baik? Jika PAD sudah terkelola dengan baik berarti daerah telah mempunyai pengalaman cukup untuk melakukan desentralisasi dalam bidang penerimaan. Hasil studi yang ada (lihat Syahrudin, Masrizal, Zulkarnain Ras, 1999) mengungkapkan bahwa sifat menunggu perintah atau mengikuti petunjuk dari atas sangat terlihat jelas dalam pola kerja aparat yang terkait dengan

penerimaan ini. Namun dalam pelaksanaan dilapangan bisa terjadi perbedaan-perbedaan yang berarti.

Saya ambil kasus pajak Hotel dan Restoran pada satu daerah tertentu. Sesuai undang-undang pajak ini harus dibuat Perda nya sebelum pemungutan dilakukan. Isi dari Perda yang dibuat oleh daerah tersebut persis sama dengan apa yang terulis dalam U.U. No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Tarif adalah 10 persen dari harga jual yang diambil oleh pemilik Hotel atau Restoran pada saat terjadi transaksi pembayaran oleh konsumen. Dalam kenyataan aparat pajak di daerah tidak memungut sebesar tarif tersebut. Jumlah pajak didasarkan pada negosiasi antara pemilik dengan aparat pajak. Satu Restoran ada yang dikenakan pajak H & R sebesar 1 persen dari harga jualnya. Jika memang pajak H & R yang realistis adalah 1 persen, kenapakah tarif dalam Perda tidak ditetapkan sebesar 1 persen tersebut agar penetapan pajak dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Negosiasi cenderung akan berakibat KKN dan akan merugikan negara.

Contoh di atas memperlihatkan rendahnya tingkat kesiapan daerah untuk menghadapi desentralisasi penerimaan. Kesimpulan ini didukung pula oleh perbandingan antara pengeluaran rutin Dispenda dengan jumlah penerimaan PAD yang dikelolanya (Tabel 3 dan 4). Pengeluaran rutin Dispenda mungkin lebih besar dibandingkan dengan PAD yang dikelola langsung oleh Dispenda. Oleh karena itu, Dispenda belum mendasarkan pekerjaan pada prinsip efisiensi.

3. Kesiapan Daerah Menghadapi Desentralisasi Pengangguran

Masih sulit untuk memberikan penilaian terhadap kesiapan daerah menghadapi desentralisasi pengangguran. Kesulitan ini didasarkan pada struktur penerimaan daerah. Penerimaan daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat sebahagian besar bersumber dari Pemerintah Pusat. Hanya sebahagian kecil saja yang dikelola oleh aparat daerah yang terkait pada penerimaan ini yaitu Dispenda.

Sesuai dengan petunjuk yang ada, daerah-daerah telah melakukan persiapan/perencanaan yang banyak. Daerah telah mempunyai rencana kelmbagaan dan organisasi pemerintahan yang menurut Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan kebutuhan

riil yang ada. Disamping itu Daerah-Daerah juga sudah mempunyai perkiraan jumlah kebutuhan tenaga kerja berdasarkan struktur organisasi yang direncanakan akan ada.

Berbagai instrumen perencanaan yang diperlukan bagi menyusun anggaran daerah (SPBD) telah tersedia. Sudah ada rencana jangka panjang, menengah dan rencana tahunan. Namun didalam kenyataan, kesemua rencana itu baru ada pada tahap pemenuhan tuntutan administrasi. Kesemua perencanaan ini belum dapat memberikan bimbingan yang jelas terhadap kebijaksanaan penyusunan RAPBD. Ditambah dengan kurangnya penguasaan terhadap prinsip-prinsip anggaran, maka keputusan pembangunan proyek tertentu lebih banyak ditentukan dengan musyawarah dari pada penentuan urutan prioritas proyek.

DAFTAR BACAAN

1. Berbagai Laporan Dinad PU Kotamadya Pekanbaru
2. Devas, Nick, dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diterjemahkan oleh Masri Masis, UI-Press, Jakarta.
3. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang "Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perhitungan APBD tahun 1997/1998
4. Mamesah, Drs. D.J (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5. Nota Keuangan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 1997/1998
6. Nota Keuangan dan RAPBN 1998/1999
7. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan dan Praktek/Pelaksanaan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) tahun 1999/2000. BPKP Perwakilan Propinsi Riau.
8. Pokok-Pkok Kebijakan Reformasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Dana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 Oleh Bappenas
9. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) 1997/1998 Kotamadya Pekanbaru
10. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) , 1999/2000, Kotamadya Pekanbaru
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004.
12. Repelita VI Kotamadya Pekanbaru
13. Risalah Pandangan Umum, Laporan Komisi dan Tanggapan Fraksi DPRD Kodya Dati II Pekanbaru Pada Sidang Pleno DPRD Dati II Pekanbaru 1998/1999.
14. Standar Harga dan Jasa untuk Keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Riau Tahun 1997/1998 dan 1998/1999.
15. Syamsi, Ibnu. Drs. S.U (1994). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
16. Rasyid, Riyaas. Prof. DR. M.A. Pidato Pengarahan Pada Seminar Tentang Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 yang diselenggarakan Oleh MIPI Sumatera Barat tanggal 7 Desember 1999 di Padang.
17. UU No. 22 dan 25 tahun 1999
18. UU No.18 tahun 1997

Tabel 1. Rencana Kebutuhan Dinas Menghadapi Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 di Sumatera Barat

No	Keterangan/Dinas	Solok	Pariaman	Agam	Pasaman	Padang	Bkt	P.Panjang
1.	PU Bina Marga	V	[[[[[
2	PU Pengairan	V	V	V	V	V	V	V
3	PU Cipta Karya	V	[[[[[
4	Kesehatan	V	V	V	V	V	V	V
5	P & K	V	V	-	V	V	V	V
6	Tanaman Pangan	V			V	V		
7	Perikanan	V	V	V	V	V	V	V
8	Peternakan	V		V	V	V		
9	Kehutanan & Perkebunan	V	V	V	V	-	-	-
10	Pernidagkop	V	V	V	V	V	V	V
11	Pem.Masy. Desa	V	-	-	-	V	-	-
12	Penerangan & Informasi	V	V	-	-	V	V	-
13	Perhubungan	V	V	V	V	V	V	V
14	Pariwisata	V	-	V	[V	V	V
15	Sosial	V	V	-	V	V	V	V
16	Pendapatan Daerah	V	V	-	V	V	-	V
17	Tenaga Kerja	V	V	V	V	V	-	-
18	Kependudukan	V	[[[V	V	-
19	Pertambangan/I.H	V	V	-	V	V	V	-
20	Polisi P. Praja	-	V	V	V	-	-	-
21	Penanaman Modal	-	V	-	-	-	-	-
22	Pertanahan	V	V	V	V	V	V	V
23	Koperasi & PKM	-	-	V	-	V	-	-
24	Kebersihan & Pertanaman	-	-	-	-	V	-	-
25	Kebakaran	-	-	-	-	V	V	-
26	Tata Kota	-	-	-	-	V	V	-
27	Kebudayaan	-	-	-	-	V	-	-
28	Pasar	-	-	-	-	-	V	-
	Jumlah	20	15	12	15	21	15	10

Sumber: Hasil Penataan Lembaga dan Struktur Organisasi Dati II di Sumatera Barat (berbagai laporan)

Tabel 2. Rencana Kebutuhan Lembaga Teknis Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999

No	Keterangan	Solok	Pariaman	Agam	Pasaman	Padang	Bkt	P. Panjang *)
1.	Bappeda	V	V	V	V	V	V	
2	Inspektorat	V	V	V	V	V	V	
3	Badan Kepeg. Daerah	V	V	V	V	V	V	
4	Badan Informasi & Komunikasi Daerah	V	-	V	-	-	-	
5	B. Keuangan daerah	-	-	V	-	-	-	
6	RSUD	-	-	V	-	-	-	
7.	B. Kesos & Pemberdayaan Daerah	-	-	V	-	-	-	
8	Hansip Kab	-	-	V	-	V	-	
9	Diklatda	-	-	-	-	V	-	
10	Penanaman Modal	-	-	-	-	V	-	
	Jumlah	3	3	8	3	6	4	

Catatan: *) tidak ada informasi

Sumber : Lihat Tabel 1

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Kabupaten Tanah Datar Menurut Sumber Tahun 1995/1996 - 1998/1999 (Rp. juta)

Sumber Penerimaan	1995/1996	1997/1998	1998/1999	1999/2000
A. Pendapatan Asli Daerah	1.608,0	2.466,5	1.912,6	2.147,7
1. Pajak Daerah	241,2	347,0	368,2	448,4
1.1. Pajak Potong Ternak	19,8	26,0	3,3	-
1.2. Pajak Hotel & Restoran *	19,0	44,1	57,2	37,0
1.3. Pajak Bangsa Asing	0,1	0,1	0,0	-
1.4. Pajak Tontonan	13,4	3,7	4,1	5,0
1.5. Pajak Reklame	13,4	11,6	12,0	12,0
1.6. Pajak Penerangan Jalan	161,0	250,2	287,5	274,4
1.7. Pajak Kenr. Perusahaan	14,6	115,5	4,1	-
1.8. Pajak Galian	-	-	-	50,0
1.9. Pajak Air Bawah Tanah & Air Permukaan	-	-	-	70,0
2. Retribusi Daerah	715,8	1.045,9	753,2	1.150,9
3. Laba BUMN	54,7	50,0	30,0	85,0
4. Penerimaan Dinas	50,7	27,2	248,6	-
5. Lain-lain	545,8	99,6	512,7	463,3
B. Bagi Hasil	2.593,7	2.546,3	3.776,9	4.577,2
1. Bagi Hasil Pajak	2.521,0	2.543,3	3.750,0	4.549,2
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	72,6	3,0	26,9	28,0
C. Sumbangan dan Bantuan	23.119,3	33.544,2	38.622,9	83.909,6
1. Bantuan	6.982,7	11.041,8	10.454,7	49.995,4
2. Sumbangan	16.136,6	22.502,5	28.168,2	33.914,2
Jumlah	27.321,0	38.557,0	44.312,4	90.634,5
Belanja Rutin Dispenda			571,7	875,3

Catatan: *) Sebelum 1997 bernama pajak Pembangunan I

**) APBD-P

Sumber : Dispenda Kabupaten Tanah Datar